



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI II DPR RI DENGAN
KETUA FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH**

| | |
|---------------------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2022-2023 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat ke- | : |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari & Tanggal Rapat | : Selasa, 31 Januari 2023 |
| Waktu Rapat | : 13.50 s.d. 15.40 WIB |
| Tempat Rapat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat |
| Ketua Rapat | : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T (Wakil Ketua/F-Golkar) |
| Acara Rapat | : Penyampaian Aspirasi terkait Perkembangan Penyelesaian Non ASN di Daerah oleh Pemerintah Tahun 2023 |
| Sekretaris Rapat | : Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI) |
| Hadir | : 34 dari 47 orang Anggota dengan rincian |

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. H. Yanuar Prihadin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

9 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
4. Riyanta
5. H. Heru Sudjatmoko
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. H. Yadi Srimulyadi
9. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.
4. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
5. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Andika Pandu Purgabaya, S.Psi., M.Si.
3. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
4. Prasetyo Hadi
5. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S. Sos., M.Si.
2. Sukamto, S.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Zulkifli Anwar
2. Rezka Oktoberia
3. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M. Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
3. Teddy Setiadi, S.I. Kom.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 Anggota:

1. H. Iip Miftahul Choiry, SPdi.

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

-

C. UNDANGAN:

1. Ketua Forum Non-ASN Jawa Tengah;
2. Wakil Ketua Fornas;
3. Ketua Inasba Batang;
4. Ketua Panorama Jepara;
5. Ketua Fornat Temanggung;
6. Ketua TPK Kendal;
7. Ketua TPD Demak;
8. Wakil TPD Demak;
9. Ketua Fornas Kota Pekalongan;
10. Wakil Ketua Fornas Kota Pekalongan;
11. Format Temanggung;
12. Ketua Fornas Brebes;
13. Fornas Kota Salatiga.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,*

Yang terhormat Saudara Ketua Forum Non-ASN Jawa Tengah,
Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara *virtual*,

Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih diberi kesehatan dan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita masing-masing, terutama kami melaksanakan tugas konstitusional dalam rangka pengawasan dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Rapat ini adalah Rapat Dengar Pendapat Umum atau audiensi, *hearing* mendengarkan aspirasi dari Bapak/Ibu sekalian, sebagaimana yang diatur dalam tata tertib DPR, maka rapat ini tidak memerlukan kourum, karena sifatnya hanya menampung aspirasi dan kemudian kita bisa berdiskusi.

Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini karena rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.50 WIB)

Kami berterima kasih kepada seluruh tamu yang hadir pada sore hari ini, siang hari ini, Bapak-Bapak dari forum non-ASN se Jawa Tengah, terima kasih juga kepada Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Saya ingin kita mengambil kesepakatan, sampai jam berapa kita rapat ini, jam 3 ya, pukul 15 ya?

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Buat kami sebetulnya di Komisi II kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu atau aspirasi yang nanti akan disampaikan sebetulnya sudah sangat sering kami dapatkan ya. Karena memang isu ini masih belum selesai, kami bersama pemerintah terus berupaya untuk bisa mencari jalan keluar terbaik terhadap masalah-masalah yang Bapak/Ibu sampaikan.

Nah, untuk menyingkat waktu kami persilakan siapa yang mewakili forum non-ASN Jawa Tengah ini untuk menyampaikan aspirasinya. Ketuanya Pak Agus Priyono ya? Pak Agus Priyono. Wakil ketuanya Ibu Riningsih. Sekretarisnya Pak Ahmad Kusnadi.

Jumlah yang hadir ada 151 orang mewakili 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Bapak-Bapak yang di sana juga, selamat datang di DPR RI, selamat datang juga di ruang rapat kerja Komisi II DPR RI.

Kami persilakan Saudara Agus Priyono.

KETUA FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AGUS PRIYONO):

Terima kasih Pak.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Name budaye,
Salam kebajikan,
Salam sejahtera buat kita semua,*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segenap limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir berkumpul di ruang rapat yang terhormat ini.

Aamiin, aamiin ya robal'amin.

Sholawat kepada junjungan kita Rasulluloh Nabi Muhammad SAW.

Allahuma sholi ala sayidina Muhammad, wa'ala ali sayidina Muhammad.

Yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Seluruh rekan-rekan non-ASN yang hadir yang tentunya sangat berbahagia di hari ini,

Alhamdulillahirobil'amin seperti mimpi saja Bapak, setelah kami berulang kali bersurat akhirnya kami diundang oleh DPR RI yang terhormat ini untuk hadir di Gedung yang sangat megah ini, pertama kalinya Pak seumur hidup baru pernah ke sini Pak, saya ke Jakarta baru dua kali.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Suratnya masa berkali-kali, baru satu kali suratnya.

KETUA FORUM NON-ASIN PROVINSI JAWA TENGAH (AGUS PRIYONO):

Tiga kali Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nyampainya bukan ke sini kali, kalau sampai ke sini pasti direspon.

KETUA FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AGUS PRIYONO):

Iya Pak, terima kasih Bapak atas fasilitas yang diberikan.

Kami hadir untuk *curhat* Pak, *ngudoroso* kalau bahasa Jawanya untuk mencari keadilan ditengah kegalauan yang kami alami.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Shaleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang secara khusus menitipkan salam hormat kepada Pimpinan Komisi II dan juga atas bantuan dan bimbingan beliau juga mengantarkan kami ke gedung ini.

Perkenalkan kami adalah Fornas Jateng, Forum non-ASN Provinsi Jawa Tengah, kumpulan para pengabdian negeri dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah dari berbagai tugas. Ada yang dari kebersihan, keamanan, supir, administrasi keuangan, ada tenaga kesehatan juga Pak, ada tenaga pendidik, ada penjaga sekolah dan sebagainya, gerbong kami besar dan banyak. Mungkin selama ini Bapak ketika audiensi hanya dengan tenaga kependidikan atau kesehatan, kami semuanya kita angkut jadi non-ASN Pak, gerbongnya banyak.

Saya sendiri Agus Priyono sebagai Ketua dari Kota Salatiga didampingi ini ada Wakil Ketuanya, Ibu Rini kebetulan hari ini berbahagia sekali Pak ulang tahun hari ini.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Selamat ulang tahun ya Ibu.

KETUA FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AGUS PRIYONO):

Kami juga didampingi para ketua, para koordinator non-ASN di masing-masing kota kabupaten dan juga kami didukung dari saudara-saudara kami yang di balkon terutama ini yang sangat berbahagia. Slogan kami "*jer besuki mowo boyo*" Pak, karena kami datang dengan modal semangat dan nekat Pak, bayar *dewe-dewe* bahasanya.

Bapak/Ibu Dewan yang terhormat,

Adalah hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 menjadi mendung yang kelabu membuat galau bagi kami non-ASN se Indonesia Pak, betapa tidak karena harapan yang kami gaungkan mulai sirna.

Ditambah lagi tanggal 22 Juli 2022 hari Jum'at lebih menyakitkan lagi ketika KemenPAN RB mengeluarkan edaran yang meng-*push* sebagian dari saudara-saudara kami pengabdian negeri terutama yang tenaga kebersihan

seperti saya, keamanan dan supir yang juga terkendala masalah syarat, umur dan ijazah harus pasrah hilang datanya dari BKN Pak.

Awalnya pendataan ini menjadi sebuah harapan bagi kami, namun justru berujung pada ketidakpastian yang berkepanjangan, mau dibawa kemana Pak nasib kami.

Di Jawa Tengah ada sekitar 200.000 tenaga non-ASN kalau secara nasional jumlahnya sekita 2 juta non-ASN yang butuh kepastian, yang butuh terlindungi dari payung hukum, butuh kesejahteraan, sebagaimana semangat kami yang ingin terus mengabdikan untuk bangsa ini Bapak.

Kami datang dengan sejuta harapan dengan sejuta impian, semoga kerja keras kami, masa bakti kami menjadi pembuka nurani pembuat kebijakan, agar ada regulasi yang memihak dan berkeadilan untuk kami semua.

Sahabat kami di kantor Pak Rahmidi sudah 22 tahun, Pak menjadi penjaga aset negara dua kantor kelurahan yang tidak ternilai harganya, nitip nasib, begitu juga dengan non-ASN di Jawa Tengah dan se-Indonesia.

Kami percaya Bapak masih ada celah buat kami, permasalahan yang *riil* nanti akan kami sampaikan di rekan-rekan yang lain, satu slogan yang kami bawa selama ini, "bahwa hidup yang tak diperjuangkan tidak layak untuk dimenangkan".

Terima kasih Bapak/Ibu Dewan yang terhormat.

Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam.

KETUA FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AGUS PRIYONO):

Lanjut rekan Mahfudin dari Cilacap untuk penyampaian secara rinci, dilanjut tadi Ibu Suko dari Batang untuk masalah klausul hukum Pak.

KETUA NON-ASN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (MAHFUDIN):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam.

KETUA NON-ASN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (MAHFUDIN):

Yang terhormat unsur Pimpinan Komisi II DPR RI beserta Anggota,

Rekan-rekan non-ASN se Jawa Tengah yang sedang memperjuangkan nasibnya, semoga kita semua mendapatkan ridho dan barokah-Nya dari Allah SWT.

Izin memperkenalkan diri Bapak, saya Mahfudin, saya dari Kabupaten Cilacap, kebetulan saya dikasih tugas sama teman-teman non ASN sebagai Ketua di Kabupaten Cilacap sebagai Ketua non ASN Kabupaten Cilacap.

Mohon izin menyampaikan Bapak Anggota DPR RI yang saya hormati, khususnya di Komisi II.

Kami akan menyampaikan hal-hal yang kami rasakan selaku tenaga honorer di daerah, terkait adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Kami sebenarnya tidak keberatan Bapak, dengan adanya pemerintah pusat mengadakan perekrutan tenaga ASN atau P3K dari jalur tes CAT yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Kami sangat mendukung karena itu bagian dari mekanisme untuk mengembangkan dan mendukung SDM yang jauh lebih baik demi kemajuan suatu daerah, karena di era sekarang itu era digital yang mau tidak mau kemajuan suatu tatanan pemerintahan harus didukung dengan SDM yang memadai.

Tetapi kami selaku tenaga honorer Bapak, juga meminta kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat supaya dalam perekrutan ASN atau P3K ini juga bisa mempertimbangkan dari aspek-aspek atau menerapkan azas-azas kemanusiaan dan berkeadilan penuh.

Karena apa? Kami menyampaikan itu semua karena kami selaku tenaga honorer yang sudah mengabdikan lama bahkan diatas 10 tahun dan ada yang sampai rentang waktu sampai 22 tahun mengabdikan sampai detik ini belum ada kejelasan terkait nasibnya Bapak.

Kami merasa dianaktirikan dengan adanya kebijakan yang ada. Kami juga memahami bahwa tenaga kesehatan dan tenaga guru adalah garda terdepan bangsa. Tetapi dengan adanya kebijakan yang ada sepertinya tenaga honorer khususnya tenaga administrasi seperti dikesampingkan. Maka kami mohon kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat untuk bisa lebih bijak dalam membuat suatu regulasi.

Kalau boleh kita semua ada di sini khususnya tenaga honorer, saat ini diberi pilihan untuk menjalani kehidupan, kita lebih memilih menjadi orang yang sukses seperti Bapak Anggota Dewan yang saat seperti ini berada. Tetapi pada kenyataannya kami bukanlah orang yang seberuntung Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, tetapi kami termasuk bagian dari orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian penuh dari Bapak/Ibu, kami semua bagian dari tanggungjawab Bapak/Ibu selaku Anggota DPR.

Kalau saat ini kami harus ditarungkan dengan anak muda yang baru lulus sekolah, dalam arti mengikuti tes CPNS, itu hal yang tidak akan pernah bisa terjadi Bapak. Karena kami semua yang ada di sini sudah menanggung beban keluarga, gaji kami diterima setiap satu bulan, ketika lusa gaji kita sudah habis Bapak, sehingga kita tidak bisa apa namanya, berpikir untuk mempersiapkan diri mengikuti tes P3K atau ASN yang pemerintah sedang canangkan.

Rata-rata dari kami itu kebanyakan adalah lulusan S3 Bapak, SD, SMP, SMA, pak. Yang pengabdianya juga tidak kalah penting dari teman-teman ASN.

Untuk mengentaskan honorer realitanya berbeda dengan banyak persyaratan yang sangat dan sangat tidak berazaskan keadilan. Contoh soal ada persyaratan yang sangat tidak memungkinkan untuk tenaga honorer mengikuti tes P3K seperti contoh melampirkan sertifikat dan lain-lain. Padahal selama ini tugas honorer melaksanakan kerjaan, pekerjaan yang tidak mungkin mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat. Sehingga kebijakan itu membatasi kami untuk mengikuti tes. Ketika kita sudah mengikuti tes, kita ditarungkan oleh anak-anak yang baru lulus dan itu juga kemungkinan bisa lolos sangat kecil.

Yang kedua, pemerintah punya program untuk mengentaskan honorer tetapi masih dibuka untuk umum. Contoh tes P3K dan ASN ini menjadi kebijakan yang sangat tidak relevan dengan program yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah mengaungkan bahwa pengadaan tes P3K itu untuk menuntaskan tenaga honorer yang sudah ada, tetapi pada realitanya jatah penerimaan tenaga teknis yang ada di daerah itu sangat-sangat minim Bapak. Sehingga jumlah yang disiapkan atau formasi yang disiapkan itu jauh, sangat jauh dari jumlah tenaga non-ASN yang ada.

Perlu Bapak ketahui bahwa kami tenaga honorer yang bekerja mengampuh suatu pekerjaan tidak ada kaitannya dengan tupoksi, kita bekerja itu seperti serabutan, kita tidak punya payung hukum yang jelas. Dengan tugas itu kita bisa membantu ASN yang boleh dikatakan kerjanya keteteran dan mengerjakan tugasnya, dalam mengerjakan tugasnya, sehingga sangat tidak mungkin atau kemungkinan itu kecil karena jabatan yang diampuh honorer itu tidak relevan.

Pemerintah membuat persyaratan untuk pengangkatan tes P3K, sedangkan syarat-syarat yang dituangkan dalam aturan itu sangat berat, sehingga teman-teman yang sudah mengabdikan ini, khususnya tenaga non-ASN itu ketika baru mendaftar saja sudah langsung tereliminasi Bapak.

Jadi, kami mohon kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat ini untuk bisa memperjuangkan usulan kami bahwa pengangkatan P3K itu kalau bisa dari jalur yang, dari jalur afirmasi penuh, terutama untuk teman-teman yang sudah mengabdikan lama Bapak.

Kami bekerja kadang tidak mengenal waktu, berangkat pagi, pulang petang tetapi kesalahan yang kita terima hanya kesalahan sedikit bisa disalahkan oleh para ASN.

Sehingga kami khususnya tenaga honorer meminta kepada Bapak/Ibu terhormat untuk dapat lebih mempertimbangkan lagi dalam membuat suatu kebijakan dan dengan adanya pemerintah pusat mengambil keputusan untuk mengalihfungsikan kami selaku tenaga honorer seperti tenaga *driver*, keamanan dan pramusaji yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus selaku Ketua, menjadi tenaga *outsourcing* itu, itu menurut kami juga tidak sesuai atau kurang sesuai Bapak. Karena fakta di lapangan ketika *outsourcing* itu terjadi justru akan menjadikan kita tenaga honorer terlepas dari kesempatan untuk mengabdikan di pemerintahan. Terlebih lagi ketika *outsourcing* itu diterapkan itu sangat-sangat-sangat kurang bisa diterima oleh teman-teman non-ASN.

Dengan adanya kebijakan meng-*outsourcing*-kan tenaga tiga tenaga dasar itu, kami merasa dibuang begitu saja Bapak. Apa iya pemerintah tidak mempertimbangkan teman-teman honorer dari masa pengabdian, sebab dengan kita di-*outsourcing*-kan, kebijakan-kebijakan itu akan berubah menjadi suatu kebijakan yang sangat otoriter dan banyak kelemahan. Meskipun yang digaungkan adalah gaji akan dinaikkan setara dengan UMK di daerah masing-masing.

Tetapi realitanya gambaran yang akan terjadi ketika aturan *outsourcing* diterapkan maka hal yang akan terjadi ketika selaku tenaga *outsourcing* misal ketika tidak masuk kerja atau izin karena sakit itu akan dipotong gajinya Bapak. Belum lagi nantinya muncul ketika kita dianggap tidak bisa bekerja oleh PNS dan dilaporkan oleh pihak ketiga, tidak menutup kemungkinan kita akan terputus secara langsung dari kontrak kerjanya.

Kami berharap kenapa kalau pemerintah bisa meng-*outsourcing*-kan artinya ada anggaran untuk membiayai kita tenaga *outsourcing*, kenapa tidak diserahkan saja kepada pemerintah daerah agar bisa dikelola dan menambahkan kesejahteraan bagi teman-teman non-ASN, Bapak. Karena ketika kesejahteraan non-ASN ditambah, saya yakin kinerja teman-teman honorer itu pasti akan jauh lebih ditingkatkan, meningkatkan kinerjanya lebih bagus lagi, karena kami di daerah.

Contohnya di Cilacap saja, gaji kami hanya Rp1.300.000,00 belum dipotong BPJS kesehatan, belum dipotong BPJS ketenagakerjaan, belum untuk iuran DWP Bapak dan itu wajib, yang diterimakan oleh kami Rp1.150.000,00 kurang lebih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Yang mewajibkan potongan itu siapa?

KETUA NON-ASN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (MAHFUDIN):

Jadi di daerah kami harus mengikuti aturan itu dan harus mengikuti program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan Bapak, itu wajib Bapak, sehingga gaji yang dari Rp1.300.000,00 itu sudah pasti dipotong, kita terimanya kurang lebih Rp1.150.000,00 itu contoh kecil di Cilacap.

Terkadang kami merasa kehadiran CPNS yang baru datang itu mungkin tidak membuat kita iri Bapak, mungkin teman-teman CPNS yang sudah diterima menjadi PNS itu karena memang yang bersangkutan pintar, tetapi di sisi lain itu membuat kita tenaga honorer merasa sakit hati. Teman-teman CPNS yang baru masuk dalam ruangan kerja saja sudah bisa mendapatkan gaji yang sangat memadai dan mendapatkan tunjangan. Sedangkan kami yang sudah bekerja puluhan tahun tidak pernah ada tambahan apapun kecuali gaji. Kita menerima setiap bulan itu seperti uang belas kasihan Bapak, iuran dari teman-teman ASN yang mohon maaf jumlahnya tidak seberapa, tetapi bukan berarti kita tidak bersyukur, itu belum memenuhi untuk kebutuhan kita sehari-hari Bapak.

Maka dari ini kami forum non-ASN Jawa Tengah khususnya memberanikan diri untuk menyampaikan hal-hal terkait apa yang dirasakan kami semua selaku tenaga honorer.

Kami berharap kepada Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat untuk bisa menerima usulan dari kami, seperti mengentaskan tenaga-tenaga honorer kategori satu dan ketegori dua yang sampai detik ini masih banyak yang tercecer. Bahkan mungkin bagian dari korban sebuah aturan sehingga yang bersangkutan sampai detik ini masih belum tahu kejelasannya Bapak terkait pekerjaan.

Di sini hadir ada yang sudah mengabdikan menjadi kategori satu atau kategori dua, mohon untuk acungkan tangan, berdiri, ini salah satu contoh K1, K2 Bapak, yang K2. Mereka berharap dari kategori satu dan kategori dua ada kebijakan yang lebih baik lagi sehingga untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan gaji yang sesuai harapan.

Yang kedua, pengangkatan tenaga honorer yang sudah mengabdikan lama untuk bisa dipertimbangkan menjadi ASN atau P3K dengan mekanisme jalur afirmasi penuh, itu yang kami harapkan Bapak.

Perubahan kriteria pendataan non-ASN tahun 2022 sehingga dapat mengakomodir semua non-ASN yang ada termasuk *driver*, keamanan, kebersihan, pegawai badan pelayanan umum daerah dan jasa pemungut, ada tenaga operator alat berat, ada tenaga teknis, tenaga administrasi yang ada di puskesmas Bapak, itu juga belum tersentuh pendataan. Mereka juga sudah mengabdikan bahkan ada yang usianya kurang tiga tahun sebentar lagi pensiun tetapi mereka belum menikmati bagaimana kerjaan yang nyaman, menerima gaji yang nyaman, itu ada Bapak di tempat kami semua. Kita belum tersentuh tenaga administrasi non-nakes yang ada di puskesmas, itu sampai detik ini pendataannya juga masih terbengkalai kemarin ada kebijakan pendataan di BKN.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Maksudnya belum tersentuh itu apa? Tidak terdata.

KETUA NON-ASN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (MAHFUDIN):

Tidak terdata Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Tidak terdata sebagai pegawai.

KETUA NON-ASN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (MAHFUDIN):

Non-ASN.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Non-ASN.

KETUA NON-ASN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (MAHFUDIN):

Iya, pada saat pendataan kemarin di BKN.

Terus kategori tenaga operator alat berat yang ada di PUPR itu juga dalam jabatan teknisnya itu tidak dimunculkan, sehingga teman-teman para operator ini agak sedikit bimbang karena tidak dimunculkan.

Terus tenaga LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) yang ada di daerah itu ada di bawah Kominfo itu juga belum tahu kejelasannya karena di jabatan tidak muncul.

Ada juga pemungut retribusi yang ada di pasar-pasar Bapak, itu hampir semua kabupaten dinas dari kabupaten/kota ada tenaga pemungut retribusi pasar. Yang mereka juga tidak kalah penting untuk meningkatkan PAD-nya di

daerah, yang bekerja harus memungut retribusi terkadang juga harus bertentangan dengan pedagang, karena pedagangnya juga agak susah untuk ditarikin retribusi, yang alasan sepi dan lain sebagainya. Tetapi demi suatu kewajiban teman-teman mereka tetap melaksanakan tugasnya sampai detik ini.

Terus ada juga tenaga yang di Dinas Pertanian, itu ada ALSINTAN (Alat Mesin Pertanian) di dalamnya ada *tractor*, pompa air dan lain-lain. Itu juga masih belum, belum dijelaskan secara rinci untuk fungsi, apa namanya di dalam jabatan yang akan diangkat dalam kebijakan.

Terus selanjutnya penambahan peta jabatan yang dapat diisi oleh seluruh non-ASN tanpa terkecuali. Sehingga seluruh kebutuhan instansi pemerintah daerah dapat terpenuhi, mengakomodir kebutuhan jabatan atau formasi yang dibutuhkan di masing-masing OPD, kecamatan dan kelurahan, ini juga tenaga administrasi yang ada di kelurahan dan kecamatan juga, terutama yang kelurahan itu ada sedikit keraguan, karena mereka masih was-was apakah masih bisa didata atau tidak Bapak, karena belum memunculkan secara pasti dalam aturannya.

Selanjutnya untuk ditinjau kembali terkait kebijakan penghapusan tenaga non ASN pada tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintah, serta meninjau kembali kebijakan terkait perekrutan tenaga *driver* dan kebersihan melalui sistem *outsourcing*.

Bapak/Ibu Dewan yang terhormat,

Besar harapan kami Bapak dan Ibu, untuk bisa lebih melihat jauh ke daerah-daerah agar permasalahan tenaga honorer bisa diselesaikan dengan baik. Dan tentunya berazaskan kemanusiaan dan berkeadilan. Karena dalam kebijakan yang sudah ada banyak pemetaan-pemetaan formasi ASN P3K yang tidak banyak diampuh oleh teman-teman honorer. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan tenaga teknis penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan lain-lain.

Sedangkan pada kenyataannya tenaga teknis yang ada di daerah banyak yang tidak tersentuh, tidak diketahui. Tadi sudah saya sampaikan, contohnya tenaga administrasi non-nakes yang ada di puskesmas mereka belum sama sekali dan tidak mendapatkan perhatian. Bahkan sudah, ada yang mendekati masa pensiun kurang tiga tahun.

Mereka berharap teman-teman tersebut bisa diakomodir dalam kebijakan yang dikemudian akan diputuskan Bapak.

Selanjutnya para operator alat berat yang ada di PUPR dan penambal jalan yang bekerjanya panasan, menanggung resiko yang lumayan berat.

Selanjutnya para penarik retribusi yang ada di pasar, tadi sudah saya sebutkan. Ada juga tenaga honorer yang berada di kelurahan, tadi sudah saya sebutkan.

Mungkin itu Bapak/Ibu Dewan yang terhormat, yang bisa saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi adalah realita yang di lapangan yang dialami oleh tenaga honorer.

Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya sampaikan permohonan maaf, tetapi akan dilanjutkan oleh rekan kami sama-sama dari Cilacap dan itu adalah perwakilan dari kategori satu yang TMS dari Cilacap.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Yang apa?

KETUA NON-ASN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (MAHFUDIN):

Yang kategori satu tetapi TMS sampai detik ini Bapak, akan menyampaikan lanjutan dari apa.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Isinya sama kan kira-kira ya?

KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (ALIF IMAN SETIADI):

Assalamu'alaikum.

Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam.

KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (ALIF IMAN SETIADI):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam.

KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (ALIF IMAN SETIADI):

Ketua DPR Komisi II,

Semoga dalam keadaan sehat *wal'afiat.*

Perkenalkan Bapak, saya Alif Iman Setiadi dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu satu pintu. Kebetulan saya tenaga honorer daerah SK Bupati tahun 2005. Kami masuk TMS pas ada pemberkasan K1. Saat itu

kami belum satu tahun di dalam pemberkasan K1. Tetapi dalam PP 48 kami masih masuk di dalamnya dikarenakan kami masuk SK itu sebelum PP 48 diundangkan per-11 November 2005, jadi kami masuk dalam payung PP 48.

Kami rata-rata SK Bupati di Cilacap, tinggal lima orang Pak dengan usia 40 tahun ke atas dan masa kerja 18 tahunan lebih dan itu tidak, sama sekali tidak tersentuh. Baik itu ada perekrutan tes atau kebijakan apa pun, payung hukum apapun setelah kami mengalami peristiwa TMS sejak 2005 itu Pak.

Jadi, kami mohon dengan sangat Bapak Dewan yang terhormat, supaya kami untuk aturan yang datang tahun itu, supaya kami terakomodir payung hukum baik bagi kami khususnya dan baik teman-teman profesi lainnya juga yang merasa banyak, banyak penderitaan di dalam setiap daerah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kami semacam ada kebijakan bagi kami semua Pak.

Matur nuwun Pak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah.

Hatur nuhun atau matur nuwun ya di Cilacap.

KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH (ALIF IMAN SETIADI):

Saya campuran Sunda Jawa Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh iya-iya, saya pikir, cukup ya?

KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH (AHMAD SAMSUL):

Pak,

Mengaris, *nuwun sewu* perkenalkan saya Ahmad Samsul dari Ketua non-ASN Kota Pekalongan.

Menambahi yang disampaikan teman kami dari Cilacap yang intinya di PP 48 itu bunyinya, "sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau tenaga sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Lha di Kota Pekalongan itu yang paling menyakitkan yang masuk kategori seperti teman kita yang di Cilacap, mereka itu dari kategori pekerja teknis, tiga pekerja teknis dari kebersihan, keamanan pasar dan *driver*.

Lha yang kami titip untuk Bapak Dewan yang terhormat, kenapa semenjak undang-undang penetapan itu diundangkan sama sekali tidak ada apa namanya kebijakan khusus bagi kami. Jadi kami ini terombang-ambing, harusnya kita itu masuk seperti kakak kelas kita yang dahulu zamannya Pak SBY masuk afirmasi penuh. Tetapi ya itu malah ada peraturan terbaru yang akan menghapuskan ketiga pekerja teknis.

Jadi, itu titipan kami dari Kota Pekalongan khususnya Pak mereka semua yang ada di atas kebanyakan dari penjaga pasar mohon berdiri, penjaga pasar, tenaga kebersihan pasar dan supir dari dinas lingkungan hidup.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AGUS PRIYONO):

Izin Pimpinan.

Biar lebih fokus lagi dari kami mau menyampaikan secara regulatif di pasal-pasal yang menjadi bahan kegalauan kami Pak.

Ini Ibu Suko sudah merangkum tentang pasal-pasal yang menjadi problematika yang muncul disitu Pak, baik dari surat edaran maupun hal yang lain.

Mohon izin untuk disampaikan oleh Ibu Suko Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sebentar saja sebentar, tetapi begini saya mau tanya. Tadi Bapak-bapak yang disebut itu tadi yang penjaga pasar terus yang lain-lain tadi ditunjuk tangan itu, rekrutmennya itu dulu kaya apa?

Pengumuman, terus Bapak daftar, terus dites, ada yang bisa jawab di sini.

KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH (KARNO):

Izin Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya.

KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH (KARNO):

Perkenalkan nama saya Karno dari Kebumen Pak.

Ini saya bantuin jawab pertanyaan Bapak ini.

Untuk perekrutan tahun 2004-2005 dulu memang secara seleksi Pak. Tetapi untuk akhir-akhir ini memang perekrutan honorer itu mungkin bukan seleksi lagi tetapi ya ada peluang masuk, ada orang dalam bisa masuk ke situ Pak.

Jadi mungkin ini juga menjadi penghalang dari teman-teman kita yang sudah mengabdikan lama sehingga tidak terpikirkan lagi Pak kaya begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Artinya kan Bapak-bapak mendapat informasi bahwa pemerintah daerah membutuhkan tenaga di pasar, di sini segala macam sehingga Bapak melamar, kan kira-kira begitukan, oke.

Silakan Ibu.

PERWAKILAN FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (IBU SUKO):

Terima kasih Bapak.

Akan kami sampaikan beberapa aspirasi yang pertama adalah mencabut Surat Edaran SE MenPAN-RB No. B/185/M/SM.02.03 Tahun 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada Nomor 6 paragraph b menyebutkan:

Menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Kemudian yang kedua, mengubah aturan rekrutmen P3K yang menyebutkan sebuah jabatan yang dilamar harus sesuai dengan pendidikan atau ijazah atau linier.

Kemudian yang ketiga, mengadakan P3K pada instansi pemerintah daerah proses rekrutmennya mengadopsi dengan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di mana rekrutmen pengadaan P3K memprioritaskan atau memberikan aturan penyeleksian di awal diutamakan dari tenaga honorer atau kontrak yang sudah bekerja di instansi pemerintah.

Keempat, perihal persyaratan surat keterangan kerja untuk diubah hanya untuk pelamar yang sudah bekerja di instansi pemerintah, sehingga mengugurkan pelamar yang bekerja di swasta atau di luar instansi pemerintah.

Dan yang terakhir Bapak, mengubah Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 pada Bab XV ketentuan peralihan Pasal 99 yang menyebutkan, "batasan tenaga kontrak atau honorer yang bekerja di instansi pemerintah hanya akan tetap dipekerjakan sampai 5 tahun sejak peraturan tersebut diundangkan dan akan berakhir pada 28 November 2023 untuk dapat dirubah menjadi pekerja berkelanjutan dengan diangkat menjadi P3K".

Demikian Bapak harapan-harapan yang kami sampaikan yang mengacu kepada peraturan-peraturan.

Terima kasih, akhir kata.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Itu tadi tuntutananya, oke.

Tolong matiin Ibu *mic*-nya, terima kasih Ibu.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Cukup ya, *enggak* kalau ngulang lagi *enggak* usah.

FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AHMAD KUSNADI):

Pengen menambahi penekanan saja buat apa namanya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah banyak yang neken ini.

FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AHMAD KUSNADI):

Buat referensi Bapak, begini.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Monggo.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumussalam.

FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AHMAD KUSNADI):

Perkenalkan nama saja Ahmad Kusnadi, Sekretaris dari Fornas Jateng, juga sekretaris dari tenaga penunjang kegiatan Kabupaten Kendal.

Pekerjaan saya Bapak, sehari-hari saya sebagai *driver* cuma SK saya kebersihan. Dan di sini saya menekankan bahwa pekerjaan seperti saya itu banyak terjadi di daerah Bapak, dengan pekerjaan sehari-hari apa dan SK-nya itu kebanyakan kebersihan, *nah* itu.

Saya tidak mau apa namanya terkait permasalahan itu, saya hanya mau menambahi terkait sama *driver* Bapak, terkait sama *driver* dan petugas palang pintu. Kenapa saya mau menambahi terkait permasalahan itu, masalahnya dua jabatan itu adalah jabatan yang membawa nyawa seorang pejabat dan warga yang terkait sama kesehatan Bapak.

Yang pertama terkait sama *driver* Bapak, sampai sekarang bahwa melihat dari perkembangan aturan bahwa untuk *driver* itu tetap digolongkan dalam tenaga dasar, bahwasannya kalau *driver* itu selama ini yang dibawa itu adalah nyawa, sedangkan nyawa yang dibawa nyawa pejabat yang menentukan semua kebijakan, hukum untuk roda pemerintahan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi yang ditekan yang mana Pak?

FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AHMAD KUSNADI):

Saya harap pemerintah untuk menentukan kebijakan terkait sama *driver* untuk bisa dipertimbangkan Bapak, ya masalahnya *driver* adalah yang dibawa ya nyawa itu tadi Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke.

FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AHMAD KUSNADI):

Terus yang kedua Bapak, yang kedua terkait sama petugas palang pintu Bapak. *Nah*, untuk dari Kabupaten Kendal, itu hampir semuanya tidak masuk dalam pendataan Bapak, padahal petugas palang pintu itu juga tupoksi yang sangat vital. Seandainya tidak ada petugas palang pintu entah seperti apa lalu lintas yang akan terjadi.

Hanya sekian sebagai apa namanya referensi buat pemerintah, semoga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan ke depannya. Saya akhiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak.

KETUA FORUM NON-ASIN PROVINSI JAWA TENGAH (AGUS PRIYONO):

Penekanannya *driver* itu bawa Pimpinan Bapak, jadi *driver* itu kan *nyupiri* Pak Kepala Pimpinan, jadi kalau *driver*-nya agak pusing nanti takut Pak yang dibawa nyawanya Pimpinan Pak, penekanannya di situ mungkin barangkali.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya. Baik.

Cukup ya saya kira ya, terima kasih.

Waduh ini kalau intinya sama saja semuanya ini, apa?

PERWAKILAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH:

Kalau mohon izin Bapak dan Ketua Pak Agus, kami dari, perkenalkan dulu Pak kami.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Langsung saja, langsung saja.

PERWAKILAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH:

Kami dari Kabupaten Batang membawa beberapa amanat juga dari pemerintahan. Karena sebelumnya kami *sowan* ke sini kami berusaha untuk mensinergikan persoalan-persoalan yang kemarin teman-teman sudah kita bahas bersama bahwa kita mau mengurai sebenarnya, mengurai persoalan termasuk salah satunya adalah rekrutmen.

Kami begini Bapak, selama ini kami melihat bahwa kita tidak begitu difokuskan terhadap rekrutmen, baik itu pendataan yang sudah kita lakukan selama ini dan kita bisa saksikan ketika kita sudah berbondong-bondong, berusaha untuk membuat satu data, data non-ASN namun ketika setelah itu juga ada rekrutmen P3K yang tidak mengakomodir terhadap kami karena persoalan linier.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah-sudah itu kan, itu sudah dapat kami pointnya. Cuman itu kan?

PERWAKILAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH:

Oke, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ibu yang ulang tahun.

WAKIL KETUA FORUM NON ASN PROVINSI JAWA TENGAH (RININGSIH):

Iya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore Bapak,

Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Pimpinan Komisi II DPR RI beserta Anggota,

Salam kenal saya Riningsih dari Kabupaten Banjarnegara, saya bekerja di Kantor UPDT Pasar I Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, saya sudah mengabdikan selama 15 tahun di Pemda Kabupaten Banjarnegara.

Langsung saja Pak, saya akan menyampaikan aspirasi dari Kabupaten Banjarnegara dan seharusnya pendaftaran CP3K tenaga teknis itu khusus untuk honorer yang sudah lama mengabdikan, non-ASN seharusnya diprioritaskan karena lebih berpengalaman kerja di OPD masing-masing. Karena di Kabupaten Banjarnegara non-ASN yang kualifikasi pendidikannya sudah memenuhi syarat saja masih banyak yang belum terakomodir Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sama, itu sudah.

WAKIL KETUA FORUM NON ASN PROVINSI JAWA TENGAH (RININGSIH):

Saya juga Pak, lalu bagaimana nasib non ASN yang belum memenuhi syarat. Mohon maaf Bapak bukannya kami tidak bersyukur, kami non ASN yang masih digaji di bawah UMK mati-matian untuk kuliah Pak, untuk makan saja kami susah tetapi kami berusaha mati-matian untuk kuliah demi kami bisa diangkat menjadi ASN Pak. Tetapi kenyataan kami semua belum terakomodir mengikuti pendaftaran tes yang P3K pun kemarin banyak yang tidak lolos administrasi, terus nasib saya gimana Pak?

Kepada Bapak/Ibu pemangku kebijakan kami mohon hargai pengabdian kami selama ini Pak, dengan mengangkat semua non ASN diangkat ASN secara afirmasi penuh, begitu Bapak.

Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Cukup ya, gini-gini saya mohon maaf saya mohon maaf. Kalau dikasih semuanya waktu kita *enggak* cukup. Dan ternyata setiap saya kasih itu sama saja yang disampaikan begitu.

PERWAKILAN 1 PROVINSI JAWA TENGAH:

Penebalan saja Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Penegasan dan penekanan jadi kalau terlalu banyak ditekan nanti lompat Pak.

PERWAKILAN 1 PROVINSI JAWA TENGAH:

Mohon maaf hanya menambahi saja, kalau tadi disampaikan untuk terkait dengan yang dari Kementerian Pendidikan, itu khusus yang guru.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya sama-sama.

PERWAKILAN 1 PROVINSI JAWA TENGAH:

Tenaga teknisnya belum tersentuh Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pokoknya semua intinya yang teknis, non teknis semua tidak terdata, kan itu intinya.

Yang kedua Bapak-bapak mengharapkan ya kalau ada perekrutan diutamakan yang sudah mengabdikan.

PERWAKILAN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH:

Pimpinan,

Tambahan Pimpinan, P3K dibayarkan oleh pusat Pimpinan bukan daerah karena setiap daerah itu berbeda-beda Pimpinan dananya, karena P3K selama ini dibayarkan oleh DAU daerah.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya oke sudah kan?

PERWAKILAN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH:

Kalau bisa dari pusat Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Cuma itu?

PERWAKILAN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH:

Iya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke, cukup ya.

PERWAKILAN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH:

Pimpinan-pimpinan,

Ini mungkin yang terakhir Pimpinan, terakhir terakhir saya berharap teman-teman ini kan halus sekali Jawa Tengah masalahnya. Saya berharap itu kaya Pak Ali begitulah kalau di TV kan luar biasa, ini harapan saya seperti itu.

Tolong yang terhormat tidak hanya sebagai catatan saja dan mendengar saja, tolonglah, tolong-tolong-tolong kami, tolong non-ASN kami untuk dikomunikasikan ke pemerintah itu harapannya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ini yang mau kita jawab, kalau Bapak-bapak *enggak* kasih kita ngomong *enggak* dijawab pertolongan.

PERWAKILAN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH:

Sebaik-baik manusia adalah yang berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya atau manusia yang lainnya.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oke.

PERWAKILAN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH:

Terima kasih Pimpinan, terima kasih semoga semuanya sehat.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Amin.

PERWAKILAN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH:

Pak Ali,

Tetap luar biasa, tetap kritis dengan pemerintah, Pak Heru tetap sehat ini ada salam Bapak dari Kendal, ternyata Pak Heru sama dari PDI DR. Sri Supriyadi, S.E., M.M.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Sudah ya oke ya.

PERWAKILAN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH:

Terima kasih Bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita iri juga kok yang dikasih salam cuma Pak Heru saja, kita *enggak*.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Pertama kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang seluruh disampaikan oleh Bapak/Ibu tadi, yang sebenarnya seperti yang saya katakan di awal kami sudah sangat paham. Karena di hari pertama kami berada di sini aspirasi yang Bapak/Ibu sampaikan ini sudah kami dengar. Bahkan sebelum kami di sini pun, itu sudah dalam catatan-catatan di Sekretariat itu sudah seringkali disampaikan.

Nah oleh karena itu kami bukan sekedar mencatat saja selama ini dan bukan sekedar menyampaikan saja ke pemerintah tetapi kami sedang berupaya melakukan upaya yang sangat serius.

Pertama, pendekatan sistem dan jangka panjang, sampai kita belum menemukan formula yang tepat, sampai saat ini kami masih membahas Undang-Undang tentang ASN. Sudah empat kali masa sidang belum selesai-selesai, salah satu isu yang membuat tidak selesai adalah bagaimana undang-undang itu bisa menjawab masalah ketenagaan honorer seperti yang Bapak/Ibu rasakan, makanya itu belum selesai, satu.

Yang kedua, pendekatan penyelesaian menengah dan cepat. *Nah*, kami selalu ya mendiskusikan. *Nah alhamdulillah* ya ini informasi tetapi ini juga masih di *exercise* ya. Kami di Pimpinan dan Kapoksi itu sudah tiga kali, dua-dua kali, ketemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk mencari formula yang paling tepat bagaimana menyelesaikan masalah Bapak/Ibu sekalian.

Dan sebelum itu kami sebetulnya juga sudah mendorong supaya DPR membentuk Pansus ya, kenapa Pansus? Supaya karena ini lebih serius ya, supaya pemerintah juga memperhatikan secara serius dan Pansus itu gabungan antara, bukan hanya Komisi II saja, tetapi Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, IX dan X bahkan begitu II, IV, VIII, IX, X itu terbentuk teman-teman di Komisi V juga ikut bergabung karena ternyata ada tenaga-tenaga di pekerjaan umum, segala macam itu yang nasibnya sama dengan Bapak/Ibu sekalian.

Jadi, sebetulnya suara DPR ini sudah sangat kuat dorongannya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak/Ibu hadapi, dihadapi selama ini.

Nah, sekarang kami lagi intensif ya, lagi sangat intensif dengan MenPAN-RB yang baru itu fokus membicarakan soal ini. *Nah*, betul kita mendorong waktu itu pintu masuknya itu adalah dari pendataan ya. Jadi kami yang mendorong supaya Kementerian itu mulai dari data, berapa sih sebenarnya orang yang sama nasibnya sama Bapak/Ibu sekalian, ini selama ini *enggak* pernah *clear* datanya.

Kami datang kunjungan kerja ke satu daerah tanya dan itu diakui oleh pemerintah daerah itu selalu data fluktuatif ya, karena apa? Karena satu, pola rekrutmennya yang tidak pasti. Kemudian kapan pemberhentiannya juga tidak pasti.

Contoh misalnya kami waktu itu ke Riau ya bisa saja kejadian, misalnya hari ini seorang tenaga honorer meninggal, istrinya nangis-nangis, tiba-tiba anaknya dimasukkin begitu aja, ada yang begitu. Itu mengganggu soal *database* yang pasti.

Nah, sama akhirnya Kementerian Dalam, Kementerian PAN RB itu membuka pendataan, itu yang Bapak-bapak bilang ada yang masuk pendataan atau tidak.

Nah, *problem*-nya kemudian ini juga sering ada *miss* koordinasi antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah ya. Prediksi awal ya, jumlah tenaga honorer semua itu sekitar 800.000-an ya dan kita waktu itu catat waktu itu kan, kementerian PAN RB mengatakan tinggal sekian, sudah diselesaikan sekian sisanya tinggal sekian begitu ya.

Nah, waktu itu kita memperkirakan sisanya tinggal 500-an tetapi begitu dibuka asumsi awal itu 800.000 dikasih waktu sekian untuk masuk dari semua kementerian lembaga dari unsur pemerintah daerah. Akhirnya per-November kemarin ternyata kementerian PAN RB itu mendapati 2.421.100 yang tadi asumsinya 800.000. *Nah*, jadi sebenarnya kita baru tahu, ya ternyata sudah dimasukkan sekian banyak pun Bapak-bapak masih ada yang merasa tidak terdata, coba bayangkan saja.

Kemudian data ini diverifikasi lagi sama Kementerian PAN RB ternyata ada yang *nggak* valid. Jadi diadakan uji publik dan perbaikan data namanya. *Nett* sekarang itu didapati 2.360.723 dan ini disuruh minta sama kepala daerah

masing-masing, apa istilahnya itu surat tanggung jawab pernyataan tanggungjawab mutlak. *Nah*, sampai sekarang itu tidak semua kepala daerah memberikan itu, kalau *enggak* salah datanya waktu itu 35%, *enggak* ya? Masih ada 500 lembaga yang belum mengirimkan surat itu.

Nah, jadi sebetulnya, saya mau nyampaikan, ini saya mau jawab tadi pernyataan pamungkas tadi. Jadi, kami sama pemerintah ini bukan hanya sekedar catat Pak, kita kerja berjuang untuk Bapak/Ibu sekalian.

Nah, sekarang, sekarang pemerintah sudah punya formula ya menyelesaikan ini tetapi harus di-*exercise* makanya kita belum membuat rapat kerja ya. Karena harus, harus dikoordinasikan dengan kepala-kepala daerah tadi itu, dengan asosiasi pemerintah gubernur, dengan asosiasi pemerintah kabupaten dengan kota, membangun komitmen ya, membangun komitmen bagaimana menyelesaikan yang sekarang ada dan kemudian bagaimana pola perekrutan ke depan dan pertanggungjawabannya.

Jadi, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, sekarang mudah-mudahan, berdoa saja, kita dalam masa-masa akhir untuk menyelesaikan ini secara tuntas ya. Mudah-mudahan formula yang sekarang sedang dirumuskan dan di-*exercise* oleh pemerintah itu bisa diterima oleh semua pihak ya.

Saya tidak tahu, apakah nanti formula itu bisa memuaskan kita semua atau tidak nanti kita lihat, tetapi kami sedang bekerja untuk itu ya. Jadi kita membutuhkan satu atau dua kali lagi konsinyering ya, baru kita nanti bicarakan secara resmi di Rapat Kerja dengan Menteri PAN RB. *Nah*, jadi itu situasi yang sekadang sedang kita lalui.

Jadi intinya kami ini ingin supaya Bapak-bapak keluar secepat dengan masyarakat tetapi ini tidak mudah, jadi jangankan bicara soal siapa yang bertanggungjawab, bicara data saja kita belum pernah belum pernah klop.

Makanya tadi saya bilang, ini kan direkam ya apa namanya *live streaming*, tadi kita lupa harusnya kita undang perwakilan dari kementerian PAN RB ya tetapi tadi sudah bilang direkam minta sama TV Parlemen, habis ini kita langsung kirim ke Menteri berita ini. Jadi artinya data yang terkumpul itu ternyata Bapak-bapak masih ada yang belum terdata. *Nah*, di mana *miss*-nya, ini-ini yang.

Jadi apa namanya tuntutan tadi soal, kami sudah bilang juga. Justru kami yang paling ngotot waktu itu, gimana kalau pemerintah tidak punya *road map*, tidak punya konsep menyelesaikan masalah honorer, kemudian tiba-tiba 28 November semua tenaga honorer dihapus. Kita waktu itu minta supaya itu tidak diberlakukan. Tetapi dengan pertimbangan lain ya tidak bisa serta merta itu misalnya sekarang kita katakan besok kami menolak, *enggak* bisa, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi jelasnya kami minta sama DPR, kalau *enggak* selesai, kalau *enggak* selesai masalah honorer ini sampai tenggang waktu 28 November 2023 itu, mending itu tidak diberlakukan itu, itu sudah komitmen kesimpulan kami pada saat itu.

Jadi, itulah Bapak/Ibu sekalian, apa namanya jawaban umum yang apa namanya, jadi jangan Bapak/Ibu pikir yang pusing Bapak/Ibu sendiri, kami juga pusing Pak, tiap hari ketemu, ini Pak Gaus ini tiap hari didatangi suruh bicara diskusi segala macam *enggak* selesai-selesai. *Nah*, jadi kita ingin semua menyelesaikan.

Kami persilakan Pak Gaus, Pak Heru, Pak Agung, Pak Riyanta, Pak Amin, sama Pak, iya-ya nanti setelah yang ini baru *virtual*.

Pak Gaus.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak/Ibu tamu-tamu kami yang terhormat,
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Menyimak dan mendengar apa yang dikeluhkesahkan oleh kawan-kawan kami dari Provinsi Jawa Tengah, jumlah kabupaten/kotanya sebanyak 35 kabupaten/kota. Pertama saya mengarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pimpinan. Jadi saya tidak perlu mengulang apa yang beliau sampaikan tetapi saya perlu juga memberikan *stressing* terhadap apa yang beliau sampaikan.

Apalagi apa yang dari yang tadi pakai peci ini, siapa namanya yang dari Kendal. Bapak bisa lihat di Youtube atau bisa dilihat berita-berita Komisi II tentang bagaimana kami memperjuangkan Bapak/Ibu, itu adalah sebuah keniscayaan dan merupakan tugas dan tanggungjawab kami. Jadi bukan sekedar mendengar, kalaulah ke sini Pak Menteri itu, apakah almarhum Tjahjo Kumolo yang sekarang digantikan Pak Azwar Anas tau kah Bapak-bapak bahwa rapat kerja kami ini yang dengan beliau itu kita tunda. Jadi, bukan sekedar basa-basi, kita cerca itu kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada honorer. Jadi rapat kami itu belum selesai, sudah tiga kali apa yang disampaikan oleh Ketua, begitu serius kami Pak.

Pertama kami ditugaskan disini Tahun 2019 Bapak ini mungkin yang nomor sekian Pak dan saya juga perlu klarifikasi tidak pernah siapa pun yang ingin RDPU dengan Komisi II khususnya, menghambat-menghambat, apalagi yang Bapak katakan tadi berbelit-belit, tidak ada itu, kalau ada tolong sebutkan nama daripada staff kami ini. Malah kawan-kawan yang Bapak-bapak sebelumnya terkaget-kaget, kami yang mengundang bukan dia yang minta diundang, bukan dia minta datang ke sini, kami yang minta. Dalam berbagai persoalan sesuai dengan tupoksi kami, apakah masalah pertanahan, masalah honorer dan lain sebagainya.

Apalagi Bapak-bapak saya merasa prihatin apa yang Bapak sampaikan. Saya sebelum keluar SK PNS, saya juga honorer di perpustakaan di kampus ketika itu, merasakan pahit getirnya, apalagi Bapak-bapak yang diilustrasikan tadi. Bisa kalau saya ilustrasikan ini nangis saya Bapak/Ibu. Jadi jangan-jangan dituduh kami ini sekedar mendengar dan untuk bukti nyata itu lihat di Youtube, Rapat Kerja Komisi II dengan MenPAN RB apa yang dibicarakan, bagaimana sikap daripada anggota terhadap apa yang disampaikan oleh MenPAN RB itu, ini perlu saya klarifikasi.

Yang kedua adalah kami juga selalu menyebut, mendesak yang namanya K1, K2 serta merta untuk menjadi PNS itu hutang bengkalai, hutang harus dibayar, kalimat ini mungkin sudah ratusan saya sampaikan. Namanya bukan belas kasihan pemerintah tidak, kewajiban, ini perlu saya sampaikan.

Juga apa yang disampaikan oleh Ketua tentang penghapusan 28 November 2023 sudah juga kita bicarakan. Kalau penghapusan dimaksudkan adalah para honorer menjadi P3 dan ASN Bapak pasti setuju dan Bapak/Ibu-ibu. Jadi, jangan apriori dulu, apa yang dimaksud oleh kebijakan PP 48 itu, kalau itu yang dimaksudkan kita setuju, jangan tolak-tolak begitu saja. Tetapi persoalannya mampu dan beranikah pemerintah untuk mengakomodir itu, termasuk juga kan dalam rangka melindungi Bapak/Ibu. Jangan lagi pemerintah kabupaten/kota merekrut, sebab ini akan menjadi malapetaka juga bagi Bapak/Ibu, makin banyak, iya itu, itu maksudnya, itu saya paham itu.

Berkaitan dengan SE saya betul juga bicara tentang hal itu. Saya dari Dapil Sumbar, ternyata kebijakan dari MenPAN RB ini bagus, baik, gunanya apa, untuk mengaca, untuk melihat, untuk mengetahui seberapa banyak jumlah daripada pegawai non-ASN ini.

Tadi diproyeksikan oleh Ketua 500, 800, tahu-tahu membengkak 2,4 juta lebih. Artinya apa, tadinya Bapak/Ibu tidak termasuk sekarang masuk, jadi jangan-jangan di, jangan apa kita beranggapan SE ini tidak bagus. Saya juga mempertanyakan bahwa SE itu bukanlah ranah untuk menjadikan honorer itu menjadi P3K atau ASN, tetapi mau dibawa kemana kan. Apa solusi yang terbaik untuk mencari persoalan-persoalan yang Bapak/Ibu suarakan ini?

Oleh karena itu saya juga tidak tahu ini dari yang Bapak sampaikan, apakah masih ada di antara Bapak/Ibu yang belum terdata terhadap surat SE 2022 itu? Banyak?

KETUA FORUM NON-ASIN PROVINSI JAWA TENGAH (AGUS PRIYONO):

Masih banyak Bapak karena SE itu kemudian mengunci.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Sudah-sudah saya paham. Sumbar pun juga banyak itu. Itu pun juga saya suarakan tetapi untuk apa? Untuk Indonesia bukan hanya Sumbar. Ini Sumbar adalah *study* kasus. Karena apa, ada kebijakan dari BKD yang tidak mau, ada betul *enggak*? Saya sampaikan itu.

Ada juga kebijakan Pemda, Walikota, Bupati, karena dia Bapak/Ibu ini bukan orang dia lalu dihilangkan data itu, itu pun juga kami suarakan Bapak/Ibu, harusnya profesional.

Oleh karena itu apa? Perlu ada *grand design* dalam menata, mencari solusi terhadap persoalan-persoalan non-ASN ini. Itu kerja-kerja kami Bapak/Ibu. Komisi II ini pada umumnya yang datang ini yang seperti Bapak/Ibu, mengeluh, mengeluh dan mengeluh dan kami akan tetap memperjuangkan apa yang Bapak/Ibu keluhkan.

Kemudian yang terakhir, sebetulnya banyak ini, Ketua sudah melihat saya jadi saya orangnya arif, kalau sudah Ketua melihat saya itu berarti sudah cukuplah katanya begitu, jadi, kalau *enggak* bisa 20 menit saya ini, jadi karena banyak yang akan bicara.

Jadi, saran saya adalah kalau memang betul apa yang Bapak/Ibu sampaikan masih banyak di antara kawan-kawan kita dalam SE 2022 itu datanya belum ter-*input* oleh BKD karena permainan macam-macam tadi, tolong, kan ada Ketuanya ini, dari kabupaten/kota, kabupaten ini tolong dikumpulkan yang tidak terdata. Ini menjadi bahan juga bagi kita pada hari ini jumlahnya adalah 2,4 juta sekian kemudian diverifikasi menjadi 2,3 bisa-bisa menjadi 5 juta, ini baru contoh soal Jawa Tengah.

Saya sampaikan tadi Sumatera Barat juga banyak. *Nah*, supaya berdayaguna, berhasil guna pertemuan kita jadi bukan-bukan sekedar mendengarkan saja, tidak.

Saya menantang Bapak/Ibu sekarang, kapan bisa Bapak/Ibu melakukan pendataan kawan-kawan yang non-ASN, yang belum terdata sesuai surat SE 2022 itu bekerjalah Bapak-Bapak untuk kepentingan kawan-kawan Bapak-bapak, bukannya hanya untuk Bapak. Kirimkan kepada Komisi II, bisa tembusannya Menteri MenPAN RB tersebut bahwa banyak bengkalai yang harus diselesaikan oleh pemerintah berkaitan terhadap bagaimana non-ASN dicarikan jalan keluar yang terbaik.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Gaus.

Pak Heru.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saudara-saudara saya dari Jawa Tengah,

Yang disampaikan Pimpinan tadi adalah sikap Komisi II, tentu juga sikap kami juga. Oleh karena itu saya tidak akan mengulang.

Izin Pimpinan, saya hanya ingin kali ini dari Jawa Tengah, saya akan menyapa secara khusus. Kebetulan yang hadir Anggota Komisi II yang berasal dari Jawa Tengah kalau tidak salah yang ini yang hadir fisik ada tiga orang, saya, saya Pak Heru, di belakang saya nanti mungkin bicara sendiri Pak Agung dan Pak Riyanto. Di samping tentunya ada yang hadir secara virtual, tanpa mengesampingkan Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Komisi II yang tidak berasal dari Jawa Tengah. Karena sekali lagi mereka satu komitmen dalam Komisi II dan Komisi II adalah Komisi yang salah satu bidangnya adalah bidang aparatur negara yang kita urus ini.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Saya hadir Pak Heru.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Beliau hadir secara *virtual* ya.

Dapil saya ya kebetulan Dapil Jateng VII mencakup Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Artinya saya bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara, iya, bisa dimanfaatkan. Minimal kalau keluh kesah di sini belum cukup bisa keluh kesah itu diteruskan, di hadapan saya di rumah saya.

Walaupun kita menyadari perjuangan ini tidak mudah, perjuangan ini bukan baru sekarang, sudah dari kemarin-kemarin dulu. Dan Komisi II senantiasa bersama-sama dengan anda-anda sekalian dari Jawa Tengah bahkan dari seluruh Indonesia yang nasibnya kurang lebih sama. Sebagian sudah berhasil, sebagian yang lain memang belum berhasil. Oleh karena itu perjuangan belum selesai.

Kami tentu akan siap berkomunikasi untuk memudahkan barangkali nomor HP saya bisa dicatat, bukan berarti saya mau apa-apa, bagaimana mau komunikasi kalau nomor HP saya, saya rahasiakan 081-2288-5647 perlu diulang *enggak*, kalau diulang saya pelankan 081-2288-5647.

Tolong dicatat juga jangan mudah kecewa kalau bertemu dengan saya, karena saya tidak mungkin memuaskan semua orang dan semua keinginan. Tetapi kami seperti halnya Bapak-bapak, Ibu-ibu di Komisi II, akan berusaha karena itu bagian dari tugas kami sebagai seorang legislator, bisa dipahami.

Saya tentu tidak perlu mengatakan bahwa nanti saya mau nyalon lagi, nanti ketemu saja di daerah.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Heru.

Ibu dari Purbalingga tadi ya? Oh, Banjarnegara masuk ya. Habis ini perayaan ulang tahunnya di tempat Pak Heru saja.

Pak Agung, Agung baru sana.

Pak Agung, Silakan Pak.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Saya mengapresiasi kehadiran kawan-kawan ini sebagai perjuangan yang luhur. Tadi Ketua menyampaikan bahwa hidup yang tidak diperjuangkan tidak layak untuk dimenangkan.

Tetapi, tetapi, sekali lagi tetapi, kalau kewajiban Ibu dan Bapak tidak dilaksanakan dengan baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak layak untuk dimenangkan. Karena apa, karena apa? Sejak kita mengabdikan pada republik ini, kepada merah putih, kepada NKRI kita sudah punya niat keinginan luhur memajukan negara ini ya. Jangan karena tuntutan belum dipenuhi, jangan karena surat edaran, jangan karena undang-undang terus kemudian *panjenengan* berubah semangat, jelas? Jadi harus semangat.

Kalau saya bilang terlambat Jawa Tengah ini terlambat, *wong* seluruh provinsi di Indonesia sudah hampir semuanya datang ke sini, kok baru Jawa Tengah baru hari ini begitu loh. Ini kayak mesin diesel panasnya belakangan tetapi mudah-mudahan punya daya dorong yang kuat ya.

Cuma tolong titip itu, kenapa saya bilang kewajiban, Pak Supir tadi ya saya bilang, mau neken boleh ya, neken rem sebegitu mungkin sehingga penumpangnya nyaman iya kan, injek gas juga injek gas yang kira-kira bermanfaat, jangan malah ketakutan begitu ya.

Kemudian termasuk teman-teman PJJ penjaga jalan lintas kereta api, Damkar, kemarin juga sudah menyampaikan ke sini. Pada bagian lain saya kebetulan ditugaskan oleh fraksi saya untuk di Banggar. Saya kategorikan Bapak-bapak yang hadir di sini adalah kelompok rentan yang sangat

dikhawatirkan oleh pemerintah untuk nantinya bisa menjadi pemicu timbulnya inflasi, jumlahnya cukup besar, kalau semua yang masuk kelompok miskin itu sudah ada batalan sosialnya. Tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu ini miskin tidak, kaya tidak, bener *nggak*?

Dan tragisnya Ibu dan Bapak itu tidak mendapatkan tunjangan apa-apa termasuk bantuan sosial, betul? Jadi yang saya ingin ngomong di sini, ketika terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan legislatif, kita lakukan pendataan, *output*-nya adalah bukan penghapusan saudara-saudara yang hadir disini dan kawan-kawan yang di luar sini. Setidaknya membatasi proses rekrutmen baru *nek ora perlu, nek duite* belum banyak jangan rekrut yang baru, bener *nggak*?

Nah, untuk itu saya minta tolong kepada teman-teman tidak hanya yang pakai peci saja, tadikan hanya mendukung, mendoakan Pak Ali begitukan, Ali Mardani maksudnya kan? Saya tahu, mendoakan supaya tetap sehat, kalau doa itu, doa yang universal tidak hanya Pak Ali, semuanya saja tetapi tidak hanya sehat saja. Ketika perjuangan ini butuh waktu, ketika perjuangan ini 2023 nanti belum tuntas ketika perjuangan ini 2024 nanti ketabrak pemilu, *panjenengan* harus doa ya. Dari tadi minta diperjuangan tetapi saya belum mendengar *statement* perjuangannya *panjenengan* terhadap kami-kami yang ada di sini.

Terima kasih, saya dari Brebes, saya sedih Jawa Tengah itu luas Brebes penduduknya paling padat, yang hadir dari Brebes cuma satu.

Baik-baik *insyaallah-insyaallah* kita dukung ya.

Ketupat kecemplung santen, bili wonten lepat nyuwun pangapunten.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Pak Amin dan Pak Mardani Ali Syara karena sudah didoain, kita tuntasin aja habisin Jawa Tengah saja biar tuntas dulu ya?

Silakan Pak Riyanta.

F-PDIP (RIYANTA S.H.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Perkenalkan dulu nama saya Riyanto, saya dari Jawa Tengah III Dapilnya yang meliputi Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan dan Blora. Saya dari gerakan jalan lurus. Saya akan ingatkan kawan-kawan yang di sini, saya masih ingat betul ketika waktu itu korban K1 dan K2 minta advokasi. Saya bersama Pak Buyamin Maki, saya masih ingat betul. Jadi betapa apa sedihnya kawan-kawan yang waktu itu mestinya diangkat, tidak diangkat. Dan saya yakin betul waktu itu ada permainan.

Kemudian juga akan saya sampaikan di forum ini bahwa khususnya yang di Pati yang bekerja di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pati itu rata-rata dipungut 60 juta. Ini saya tidak ngomong *ngawur* dan pernah saya sampaikan di aparat kepolisian tetapi juga belum ada tindakan. Saat itu saya belum dipercaya oleh kawan-kawan untuk masuk di komisi ini, itu sudah saya mencoba untuk saya laporkan.

Kemudian juga waktu itu ada sekitar 100 berapa tenaga honor di Pasar, itu rata-rata dimintain duit 20 ribu, eh 20 juta, itu juga sudah saya berikan advokasi. Kemudian juga ada beberapa yang saya minta kepada Kepala Dinasnya waktu itu, kemudian juga ada beberapa yang saya dorong untuk dilaporkan ke Polri tetapi belum-belum tuntas.

Jadi, saya sangat memahami betul apa yang *panjenengan* rasakan. Kebetulan istri saya tercinta seorang guru SD. Jadi saya sangat paham betul ketika apa yang diberikan kepada kawan-kawan tenaga honor, tenaga kontrak itu iuran ketika salah satunya istri saya menerima gaji, walaupun itupun juga tidak terlalu banyak, paling 200 ribu, itu saja hasil dari pada iuran.

Jadi, oleh karena itu saya sampaikan di forum ini, kawan-kawan di Komisi II itu semua sebenarnya sudah sepakat untuk memperjuangkan kawan-kawan untuk diselesaikan.

Kemudian saya juga ingin saya sampaikan di forum ini. Saya dulu anggota Polri, saya keluar, karena saya merasa waktu itu gajian anggota Polri juga tidak banyak, walaupun kalau saya bandingkan dengan kawan-kawan PNS waktu itu lebih banyak penghasilan saya, karena saya ada lauk pauk, saya keluar.

Kenyataannya juga Tuhan tidak membuat hidup saya ini tidak bahagia, justru Tuhan mengantarkan saya, saya bisa berkumpul dengan kawan-kawan Komisi II ini. Saya terakhir pangkat hanya koprал tetapi dengan semangat, dengan kegigihan, tapi nyatanya juga apa yang saya peroleh hari ini juga melebihi apa kawan-kawan saya yang kebetulan ada di Eselon II, itu juga kalau dari sisi macam-macam masih apa ya, artinya masih saya lebih bahagia. Dan kebahagiaan saja sebenarnya ketika saya bisa bebas itu dan saya bisa bersyukur.

Kemudian saya akan sampaikan kepada kawan-kawan, kalau selama ini hanya minta diangkat, minta macam-macam, ini hanya berhenti di situ saja, kemudian kawan-kawan apa tepuk tangan ketika kawan-kawan saya memberikan satu *support*. Itu saya ingin sampaikan agar arah perjuangan

sampeyan nanti difokuskan, untuk bagaimana agar undang-undang No.5 Tahun 2014 ini segera direvisi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua, *sampeyan* fokus di situ, semua nanti fokus di sana, kawal, kalau *sampeyan* hanya datang kemudian kawan-kawan saya memberikan semangat *dikeplokinah* *enggak* akan ada hasilnya, *ya*.

Tetapi ketika *sampeyan* itu fokus, itu untuk direvisi sudah, sebenarnya itu sudah kesepakatan Komisi II, bahkan sebelum saya menjadi Anggota DPR ini juga sudah rekomendasi dari Komisi II selalu diberikan kepada pemerintah.

Kemudian ini biar tidak menimbulkan apa tafsir yang lain-lain berkaitan dengan Surat Edaran Kementerian PAN yang era Pak, Mas Tjahjo Kumolo. Saya ingin sampaikan di forum ini. Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 itu diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, waktu itu yang menandatangani pemerintah masih Bapak SBY. Coba *sampeyan* buka itu kan masih Pak SBY, lah apa yang dilakukan oleh Pak MenPAN itu hanya penegasan daripada Undang-Undang 5 2014, jadi ini jangan sampai persoalan ini nanti dipolitisir, kami tidak ingin seperti itu.

Dan saya akan sampaikan di forum ini khususnya kawan-kawan yang berasal dari Pati, Blora, Rembang maupun Grobogan, tolong nanti jangan pilih saya. Ini saya serius, ketika saya tidak bermanfaat untuk kalian semua, oke, ini saya serius, ini saya serius, karena ini juga sudah satu kesepakatan teman-teman Komisi II.

Kebetulan saya tadi sudah *nyalamin* kawan-kawan yang ada di bawah ini, saya seluruh Jawa Tengah ini sampai yang apa jalan-jalan tikus paham, termasuk kemarin terakhir di tempatnya Pak Agung di Brebes. Jam berapa itu sampai jam satu malam, katanya Pak Agung medannya sulit, tetapi karena saya sudah berniat mengunjungi tempat itu tetap saya sampai di situ.

Saya akan sampaikan di forum ini Pak Ketua, di beberapa daerah itu satu sekolahan, itu yang ada sekitar tujuh apa kepala sekolah sama kemudian penjaga satu, itu yang PNS itu hanya kepala sekolah, itu ada, coba, ada, bayangkan.

Padahal kalau kita berkaca kepada salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu mestinya guru kelas itu harus PNS atau ASN mestinya termasuk penjaganya. Penjaga itu ada yang sudah sampai 35 tahun Pak Ketua itu belum diangkat. Ini saya bicara kemanusiaan, jadi bicara kemanusiaan.

Jadi sekali lagi saya berharap kawan-kawan nanti perjuangannya difokuskan untuk bagaimana keinginan kawan-kawan Komisi II yang ingin merevisi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 itu segera direalisasikan. Karena ketika salah satu pasal yang mengatur itu tidak direkonstruksikan *sampeyan* itu nanti hanya capek, hanya capek.

Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi kawan-kawan yang ada di Grobogan, Pati, Rembang dan Blora, nanti tanggal 14 Februari 2024 jangan pilih saya, ketika saya tidak ada kemanfaatannya untuk *sampeyan, matur nuwun*.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi warabarakatuh,

Terima kasih Pak Riyanta.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bapak-bapak dan Ibu-ibu,

Itu perhatiin wajahnya Pak Heru, Pak Agung sama Pak Riyanta, kalau perjuangan berhasil jangan lupa pilih lagi ya, mohon dipilih yang lain didoakan supaya terpilih lagi.

Pak Amin dan Pak Mardani Ali Sera,

Eggak perlu selama bertiga ini tadi, karena ini bukan konstituen Bapak, jadi sebentar-sebentar saja.

Silakan Pak, silakan.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,
Pimpinan dan Anggota Komisi II,
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Menyimak dari semua yang dikemukakan di forum ini, tentu Komisi II sangat mengapresiasi bahwa kehadiran Bapak dan Ibu semua sudah sesuai jalurnya. Kami duduk di sini juga dalam rangka mewakili *panjenengan* semua meskipun saya dari Jawa Timur Ketua ya, saya dari Jawa Timur ya.

Apa yang Bapak/Ibu rasakan tentu juga menjadi bagian yang kita rasakan. Namun, di Komisi II dengan berbagai dinamika dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri, dengan pemerintah, *progress* untuk menyelesaikan persoalan tenaga honor ini sudah ada kemajuan ya, ada kemajuan. Salah satunya adalah dibukanya formasi-formasi baru selain guru dan nakes ya, itu karena kita di forum Komisi II ini mendapatkan masukan, keluhan. Yang dulu namanya tenaga teknis di sekolah, juru apa, juru ukur di BPN dan sebagainya itu tidak pernah terpikir. Kalau toh ada itu formasinya kecil.

Maka pada kesempatan rapat hari ini, saya ingin pastikan bahwa semua Anggota Komisi II dari Pimpinan dan Anggota komitmennya sama, kasih kesempatan yang sama pada semua bidang, supaya mereka bisa terakomodir penyelesaian skenario tenaga honor ini secara bertahap, karena ini juga menyangkut ketersediaan anggaran.

Maka yang perlu dipastikan di sana pastikan semua kepala daerah mengajukan formasi untuk menyelesaikan itu. Karena kalau kepala daerah tidak mengajukan, tidak mungkin akan dikasih alokasi formasi oleh kementerian MenPAN RB ya, itu.

Kepegawaian yang hadir di daerah harus *fair*. Kalau memang kebutuhan di daerah itu formasinya kosong, diisi dong oleh tenaga-tenaga yang sudah mengabdikan ini. Komisi II akan dukung itu ya.

Yang kedua, terkait revisi Undang-Undang ASN. Ini semua juga dalam rangka mencari formulasi yang efektif dalam rangka menyelesaikan persoalan klasik ini. Tenaga honor mestinya K2, kasus K2, K1 itu sudah selesai tahun 2005. Karena saya dulu waktu menjabat walikota tahun 2005 itu sudah beres semua, tetapi kenapa masih ada tersisa, ini pertanyaan.

Makanya tadi saya mendukung data yang kalau memang itu diperlukan di forum ini segera cukupi, supaya apa? Kita bisa mengurai akar persoalannya *enggak* sampai ditindaklanjuti menjadi PNS pada saat itu apa persoalannya? Supaya kita ini bicara pakai data, tidak bicara pakai asumsi.

Oleh karena itu kami sangat berharap di forum ini Bapak dan Ibu semua, tetap melakukan upaya-upaya yang baik dalam menjalankan tugas di daerah masing-masing, yang tentu ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan dari semua Anggota yang ada di sini. Terutama yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Tengah pesannya sudah jelas itu, pesannya sudah jelas, dari Pak Heru, Pak Agung, Pak Riyanta iya, termasuk Pak Endro. Oh Pak Endro bukan dari Jawa Tengah, dari Lampung tetapi kuliahnya di Jawa Tengah.

Pesan-pesan itu menurut saya Bapak/Ibu, bisa maknai secara positif bahwa kami yang ada di ruangan ini tidak ada sedikit pun keraguan untuk berjuang bersama Bapak/Ibu semua.

Saya kira ini Ketua yang bisa kami sampaikan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Pak Mardani.

F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):

Terima kasih Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Alhamdullilah Allahumasholi alla sayidina Muhammad ama bad'hu,*

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,

Saya bahagia sekali, tepuk tangan untuk Fornas kita ini ya, luar biasa, karena teman-teman sudah memberikan contoh teladan, bagaimana mengorganisasi diri untuk mencapai kepentingan tujuan organisasi. Dan nampaknya kalau solid seperti ini *insyaallah* dalam waktu dekat tujuan akan tercapai, kenapa? Karena tiga faktor utamanya sama.

Kami di Komisi II sepakat memperjuangkan Bapak dan Ibu, bukan sekedar mendapatkan status tetapi juga peningkatan pendapatan ya, karena itu penting, penting, penting. Kalau sudah terdaftar tetapi pendapatannya kayak sekarangkan ya utang juga ya, tombok juga begitu loh, harus ada peningkatan.

Kalau saya dari dulu itu usul gaji guru minimal Rp20 juta, *nah* gaji teman-teman minimal Rp10 juta begitu loh iya, karena saya yakin teman-teman kalau gajinya gede tetep infaknya bagus, sedekahnya bagus, bisa umroh dan naik haji, begitu ya, *aamiin*. Tidak akan berjudi, tidak akan tempat-tempat buruk karena rata-rata dari pendapatan, pengetahuannya bagus sekali.

Nah, yang kedua yang juga kita syukuri pemerintah ini ya. Saya namanya Mardani Ali Sera, partainya Partai Keadilan Sejahtera dan oposisi sama Pak Jokowi tetapi untuk bab ini saya lihat Pak Jokowi dan timnya *insyaallah* akan membantu Bapak/Ibu semua. Karena itu buat kami kalau pemerintah bagus kita dukung, kalau pemerintah naikin BBM kita tolak begitu ya, karena menyengsarakan kalau naik BBM ya begitu.

Nah, yang ketiga yang juga bersatu bukan cuma teman-teman Jawa Tengah, seluruh Indonesia bersatu. Jadi tiga ini *insyaallah* dalam waktu dekat mudah-mudahan ada kabar gembira buat kita, *aamiin*.

Tetapi jangan lupa usaha kita tidak sempurna sebelum dilengkapi dengan doa, doa dan doa. Makanya tadi bagus sekali doanya. Dan kalau saya antara usaha dan doa, doa duluan, doa dan usaha, kenapa? Doa itu kita meminta kepada Yang Maha Kuasa, sementara kalau usaha dari kita yang tidak punya kuasa, se-President sekali pun masih pusing ini, kenapa Pak MenPAN muter-muter, karena Ibu Menkeu memang alokasinya masih kecil, begitu loh. *Nah* kenapa? Karena negeri kita masih belum menjadi negara maju. *Nah* untuk itu doa dan usaha.

Dan terakhir menurut saya yang paling penting, saya tadi sudah mencatat nih ya, mana dari petugas kebersihan ini, mana dari *driver-driver*, itu dua kali angkat tangan, SK-nya kebersihan tugasnya *driver*. Mana dari keamanan, banyak, mana dari administrasi, *masyaallah*, mana dari palang pintu? Penjaga palang pintu ada ya, aspirasi, iya kenapa.

Insyaallah pertemuan hari ini hasilnya akan baik dunia dan akhirat, *aamiin*. Dan jangan lupa ya ingatkan kami, tadi Pak Gaus luar biasa Pak Gaus ini dari Sumatera Barat. Dan jangan lupa Pak Ketua ini, Sumatera Utara ini Pak Ketua ini, yang paling jagain komisi, tepuk tangan buat Ketua dulu ini. Nanti jangan lupa doakan, kita semua didoakan agar benar-benar bisa sukses memperjuangkan apa yang Bapak/Ibu inginkan, *insyaallah* itu saja.

*Haddanallahu wa iyakum ajamain,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq war aquminkum,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi,

Terima kasih Pak Mardani.

Selanjutnya tadi ada Pak Ongku, selanjutnya Pak Sukamto, singkat-singkat Pak ya, ini kita sudah lewat dari jam tiga, sudah setengah empat saking sayangnya Komisi II sama Fornas Jateng.

Pak Ongku sudah *enggak* ada, sudah izin, Pak Kamto.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan, Anggota,
Bapak/Ibu yang saya hormati,
Hadirin, hadirat sekalian yang selalu dilindungi Allah SWT,

Alhamdulillah wasyukurillah.

Nama saya Sukamto dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta hanya berbatasan garis saja dengan Jawa Tengah.

Saya kira apa yang dibawakan Jawa Tengah, ini kita perlu mengapresiasi dan ini bukan untuk kepentingan Jawa Tengah semata-mata. Pada prinsipnya semua Komisi II siap mendukung apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara, apabila ada satu atau berapa Komisi II yang tidak setuju, silakan pindah dari Komisi II. Jadi Komisi II khususnya dari PKB dan seluruh-seluruh yang Anggota Komisi II pada prinsipnya siap memberikan dukungan.

Kami memahami, menyadari saudara-saudara saya tahu dari biaya sendiri, syukur ini tadi ada Pak Heru, Pak Agung, Pak Riyanta yang mana Dapilnya sana bantulah mereka, supaya mereka juga bisa meringankan bebannya.

Sekian terima kasih, prinsipnya dari Partai Kebangkitan Bangsa beserta seluruh partai yang dari Komisi II siap memberikan dukungan dan menyukseskan, apabila ada yang tidak setuju, silakan tinggalkan Komisi II.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, terima kasih Pak Kamto.

Yang bantu jangan Pak Heru dan Pak Agung dan kawan-kawan, Pak Kamto juga bantu.

Itu Pak Ongku sudah tetapi tadi sudah lewat, ini Pak Toha ini Pak Toha, Jawa Tengah ini Jawa Tengah, tadi sudah saya panggil Pak Ongku sudah *enggak* ada lewat. Jadi kita putar lagi, kita putar lagi, sekarang Pak Toha, tetapi jangan lama-lama Pak, tadi sudah diwakili tiga orang Pak Jawa Tengah.

Silakan Pak Toha.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semuanya yang saya hormati para tamu kita non-ASN yang hampir menjadi ASN yang saya banggakan dan hormati,

Saya hanya satu menit dengan mengucap *bismillah*, saya ikut teman-teman Komisi II untuk memperjuangkan teman-teman ini sekalian. Saya dari Dapil Jawa Tengah V Solo, Klaten, Boyolali, Sukoharjo.

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam.

Ada *enggak* Solo, Klaten, Boyolali ada?

Nanti besok dikirim lagi Pak Toha.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Hidup Pak Toha.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Pak Ongku.

F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Siap terima kasih Ketua, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Mungkin saya sedikit saja lebih panjang dari Pak Toha, jadi saya bukan dari Jawa Tengah, saya dari Sumatera Utara II tetapi permasalahan ini ada di seluruh Indonesia. Dan ketika saya reses juga hal yang sama juga dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak sekali teman-teman di sana baik Damkar, Satpol PP, petugas kebersihan, *driver* dan sebagainya dan sebagainya tadi itu, semuanya juga mengeluhkan hal yang sama.

Saya cuma satu saja Pak Pimpinan, sebagaimana Pak Toha sampaikan, saya juga merekomendasikan, agar kita Komisi II benar-benar harus *straight to the point*, bilang sama Menteri, bahwa sebelum seluruh persoalan non ASN ini selesai tidak ada batas November 2023 ini dan kita mengusulkan agar semua yang ada sekarang itu diselesaikan dulu tuntas dengan prioritas kepada mereka.

Barangkali itu saja, saya minta rekomendasi ini supaya benar-benar kita perjuangkan dan ini yang kita sampaikan kepada Menteri MenPAN. Barangkali itu saja Pak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Ongku.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Seperti yang tadi yang saya sampaikan di awal bahwa apa yang tadi disampaikan Pak Ongku itu, sudah jadi rekomendasi kita pada rapat kerja yang sebelumnya, jadi ini penegasan dari.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Ikut mendukung Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya silakan Ibu Dian.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Iya terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya luar biasa sekali RDPU hari ini, *alhamdulillah* semua teman-teman mendukung perjuangan untuk para rekan-rekan di non-ASN, begitu juga dengan saya untuk DKI saya dukung 100%, *insyaallah* nanti saya akan berkoordinasi langsung untuk membicarakan tentang tenaga non-ASN dan honorer ini untuk di DKI. Mungkin hari ini ada yang datang dari DKI? Apa cuma dari daerah ya?

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah ini Fornas Jateng.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Oh untuk Jawa Tengah saja, Jawa Tengah saya mendukung terutama untuk seluruh Indonesia ini adalah isu nasional sebenarnya. Jadi untuk perwakilan Jawa Tengah, terima kasih sekali yang hari ini sudah datang ke Komisi II.

Selanjutnya untuk yang lainnya jangan khawatir kami semua di Komisi II untuk semua daerah mendukung tentang ini dan saya berharap ini juga, jangan sampai nanti 2023 di bulan November selesai Pimpinan. Kita harus ada gerakan yang lebih cepat seperti yang kemarin sudah dibicarakan dengan komisi-komisi lain juga.

Itu saja dari saya Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Baik, terima kasih Ibu Dian.

Jadi saya kira sudah ya tadi sudah mewakili semua Bapak dan Ibu Komisi II itu punya komitmen.

KETUA FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AGUS PRIYONO):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Bukan hanya komitmen, akan tetapi sudah dan sedang ya.

KETUA FORUM NON-ASIN PROVINSI JAWA TENGAH (AGUS PRIYONO):

Minta izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Memperjuangkan dari ini, iya sebentar saya sebentar dulu, tenang saja Pak Ketua nanti saya kasih lagi.

Jadi, tadi Bapak/Ibu sudah sama-sama dengarkan, ya itu sama-samalah kita berjuang Bapak-bapak dan Ibu-ibu terus berdoa. Yang penting juga sampaikan kepada kepala daerah, ini kadang-kadang *miss link*-nya itu ada disitu, kami di sini bicara terbuka dan ngambil kesimpulan di level kementerian tetapi kemudian kadang-kadang kebijakan itu sampai di daerah tidak terimplementasi dengan baik.

Saya yakin tadi data-data itu tidak, Bapak/Ibu ada yang tidak terdata, mungkin karena ada yang beda kebijakannya atau mungkin nanti harus ada pembagian kewenangan, siapa yang ngurus A, siapa yang ngurus B begitu misalnya. Mungkin yang ngurus A itu pemerintah pusat, urus B itu pemerintah daerah, *nah* sekarang sepertinya belum, ini yang sekarang sedang dilakukan sinkronisasi dan *exercise* oleh Kementerian PAN RB.

Sebelum kita tutup, kami silakan untuk Ketua Fornas Jawa Tengah untuk menyampaikan pernyataan akhirnya.

Silakan.

KETUA FORUM NON-ASN PROVINSI JAWA TENGAH (AGUS PRIYONO):

Iya terima kasih Pimpinan.

Para Anggota Dewan yang terhormat,

Bersyukur sekali hari ini kita langsung menyampaikan *uneg-unegnya*, didengarkan langsung dan teman-teman juga sudah mendapatkan oleh-oleh nanti Pak kita pulang ke daerah masing-masing.

Terakhir kami berharap ketika nanti ada pertemuan antara Komisi II dengan Kementerian panggil kami Pak, biar kami juga bisa omong langsung ke kementerian, mereka selama ini kelihatan tidak tahu kondisi sebenarnya dilapangan. Jikalau ada pertemuan yang baik seperti itu kami dihadirkan juga tentu sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa sedikit juga memberikan solusi-solusi versi kami Pak sebagai non-ASN sebagai obyek yang dibicarakan.

Dan sekali lagi terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya, mohon maaf Pak bila ada hal-hal yang mungkin dalam diskusi tadi ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf dan doakan kami untuk kembali ke daerah kami dengan selamat.

Dan pastikan bahwa kami akan segera mengajukan juga pertemuan dengan gubernur untuk menyampaikan hasil pertemuan ini, kami juga akan menyampaikan hasil ini ke bupati, walikota masing-masing. Dan juga kami pastikan perjuangan kami tidak akan pernah berhenti Pak, bahkan untuk maju ke Presiden kami siapkan dalam waktu dekat Pak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Ketua Fornas Jawa Tengah.

Pertama tadi untuk permintaan kami di sini punya tata tertib, di dalam Rapat Kerja itu diatur siapa yang hadir, siapa yang berkenan bicara dan seterusnya. *Nah*, makanya termasuk juga kenapa Bapak-bapak kita undang khusus, seperti yang saya katakan tadi pembicaraan yang semua Bapak/Ibu sampaikan hari ini di-*record*, direkam bahkan *live streaming* semua orang seluruh Indonesia yang mengakses bisa lihat.

Nah, tadi kan sudah saya katakan, saya sudah minta sama Sekretariat, setelah ini ditutup semua pembicaraan ini, rekaman ini akan kami kirim ke Menteri PAN RB untuk lihat dari awal. Jadi, kalau Bapak tadi hanya sekedar mau menyampaikan *insyaallah* sampai ya, nyampe ke Komisi II, nyampe ke sana, bukan hanya catatan tetapi rekamannya kami kirim ke sana. Jadi, orang per-orang Bapak tadi sampaikan itu nanti dilihat sama Pak Menteri dan sStaff-nya di sana.

Kemudian yang kedua walaupun yang hadir hari ini adalah Fornas Jawa Tengah, tetapi yang kami bicarakan semua tadi adalah mewakili seluruh Indonesia ya. Jadi tolong sampaikan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat namanya Fornas kan, Forum Nasional iya Forum non-ASN iya pasti, kita juga datang dari Sumbar dari mana-mana pada datang ke sini.

Jadi, walaupun yang hadir hari ini secara fisik teman-teman Jawa Tengah, tetapi ini mewakili aspirasi dan perjuangan kita untuk semua Bapak/Ibu seluruh Indonesia.

Jadi, saya kira itu yang bisa kita simpulkan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dari Fornas Jawa Tengah.

Terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir baik secara fisik maupun virtual pada siang sampai sore hari ini.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* maka rapat ini saya nyatakan ditutup.

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,

*Wabillahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.40 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

a.n. hā,

**Mahmud, S.E.
196508021988031002**